



Press Release

Media Gathering BPDPKS 2020

Mewujudkan Industri Sawit Berkelanjutan Melalui Integrasi Program Pengembangan Sektor Hulu dan Hilir

Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020

JAKARTA, 17 Desember 2020—Pandemi COVID-19 telah mengganggu stabilitas perekonomian global dan membuat sebagian besar negara di dunia mengalami resesi. Namun demikian, untuk kondisi dalam negeri, di saat banyak sektor ekonomi terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19, industri sawit mampu menunjukkan kekuatannya dan menjadi salah satu dari sedikit industri besar nasional yang mampu bertahan.

Selama pandemi COVID-19, kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit tetap berjalan normal sehingga sekitar 16 juta petani dan tenaga kerja di sektor sawit masih memiliki sumber pendapatan di tengah kelesuan ekonomi sepanjang tahun ini. Kondisi demikian tentunya memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia untuk memulihkan perekonomian, menutup defisit neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut terlihat dari peran industri sawit dalam menahan perlambatan ekonomi nasional yang pada Triwulan II/2020 mengalami penurunan sebesar 5,32%, pada Triwulan III/2020 menjadi lebih baik yaitu -3,49% dan Bank Dunia atau *World Bank* memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini akan berada pada kisaran -2,0 s.d. -1,6 persen (year on year) yang merupakan pertumbuhan negatif pertama kali dalam dua dekade terakhir.

Salah satu faktor penting ketahanan pertumbuhan sektor sawit selama pandemi Covid-19 di dalam negeri adalah adanya program penggunaan energi terbarukan melalui mandatori biodiesel berbasis sawit. Setelah sukses menjalankan program mandatori biodiesel 20% sejak 2016 sampai dengan 2019, pemerintah melanjutkan dengan program mandatori B30 sejak Januari 2020 yang menambah daya serap minyak sawit di pasar dalam negeri sekaligus mendorong stabilitas harga minyak sawit.

Capaian BPDPKS 2020

Sepanjang tahun 2020, industri sawit sempat dihantam oleh semakin melebarnya gap antara harga *Crude Palm Oil* (CPO) dan harga minyak dunia. Kondisi tersebut mendorong peningkatan yang sangat signifikan terhadap kebutuhan dana insentif biodiesel di tahun 2020 dan proyeksi kebutuhan dana biodiesel di tahun 2021. Sepanjang tahun 2020 BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan baik dari Pemerintah maupun pelaku industri sawit telah berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan mensimulasikan berbagai skenario serta merumuskan alternatif kebijakan untuk menjaga kecukupan dana yang dikelola oleh BPDPKS.

Di akhir Triwulan III tahun 2020, pemerintah telah memutuskan kebijakan untuk merubah tarif pungutan ekspor sawit dan produk turunannya yang diwujudkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191 /PMK.05/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk menyesuaikan kebutuhan dana bagi pendanaan program-program sawit berkelanjutan, sekaligus meyakinkan seluruh pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan program mandatori biodiesel B30. Program mandatori biodiesel ini tidak hanya penting untuk kedaulatan dan kemandirian energi nasional tetapi juga menjaga kestabilan harga sawit.

Program insentif Biodiesel melalui pendanaan dari BPDPKS yang implementasi pertamanya sejak Agustus tahun 2015 dan terlaksana sampai November 2020, telah menyerap biodiesel dari sawit sekitar 23,49 Juta KL setara dengan pengurangan *Greenhouse Gas Emissions* (GHG) sebesar 34,68 Juta Ton CO₂ ekuivalen dan menyumbang sekitar Rp4,83 Triliun Pajak yang dibayarkan kepada negara.

Dari program dukungan penelitian dan pengembangan sawit, sejak tahun 2015 hingga 2020, BPDPKS telah memberikan total dukungan pendanaan riset sebesar Rp326,2Miliar dengan melibatkan 43 lembaga litbang, 667 peneliti, 346 mahasiswa dan telah menghasilkan output sebanyak 192 publikasi jurnal internasional dan nasional, 5 buku, serta 40 paten.

Beberapa riset unggulan yang dibiayai BPDPKS antara lain: pengembangan katalis merah putih dan teknologi bahan bakar nabati biohidrokarbon (*green diesel* (D100), *Green Gasoline/ Bensin Sawit* (Bensa) (G100) dan lainnya) yang telah dijadikan riset strategis nasional, rancang bangun teknologi untuk meningkatkan kualitas panen, pengembangan teknologi peningkatan mutu

minyak sawit, mitigasi terhadap adanya bahaya yang ditimbulkan oleh kandungan kimia minyak sawit (3-MCPDE dan GE), sistem deteksi dini penyakit pohon sawit seperti ganoderma, dampak pengusahaan kebun sawit pada lahan gambut serta pengembangan aplikasi teknologi berbasis IT untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri sawit.

Untuk program Pengembangan SDM sawit, sejak tahun 2015, telah diberikan beasiswa Pendidikan putra/putri petani/ buruh sawit kepada 2.605 Mahasiswa untuk program politeknik D1, D3 dan D4 serta telah menghasilkan 1.200 sarjana D1, 120 sarjana D3, dan juga telah dilaksanakan program pelatihan kepada 9.178 petani sawit.

Tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini dilaksanakan untuk membantu Pekebun Rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan pohon kelapa sawit yang lebih produktif dan TBS yang lebih berkualitas, penerapan prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices* serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal seperti Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF (*Land Use, Land-Use Change and Forestry*). Dalam program ini, untuk memastikan prinsip keberlanjutan, peserta program juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama.

Sejak dimulainya program peremajaan sawit rakyat di tahun 2016 hingga saat ini, program PSR telah melibatkan lebih dari 100 ribu petani rakyat, dan lebih dari 200 ribu hektar kebun yang menerima dana PSR. Untuk mempermudah penyaluran dana PSR juga terus dilakukan penyempurnaan meliputi penyederhanaan persyaratan, verifikasi terintegrasi, dan aplikasi PSR secara online, sebagai media untuk pengajuan proposal, evaluasi dan monitoringnya.

Di tengah Covid-19 yang melanda seluruh negeri, BPDPKS berkomitmen untuk tetap menjalankan seluruh program penguatan industri sawit.

Integrasi Program Hulu dan Hilir Sawit,

Dalam menjalankan fungsinya BPDPKS memiliki tiga fokus utama rencana strategis dalam upaya mendorong kinerja industri sawit Indonesia, yaitu: perbaikan kesejahteraan petani, stabilisasi harga CPO, dan penguatan industri hilir.

Program dukungan BPDPKS terhadap sektor hulu dan hilir sering kali menjadi bahan perdebatan. Misalnya, prioritas program hulu seperti Peremajaan Sawit Rakyat disandingkan dengan program hilir seperti dukungan insentif biodiesel. Apabila perdebatan ini hanya dilihat dari satu perspektif saja, yaitu alokasi dana, maka akan terlihat timpang, dimana program biodiesel menjadi program dengan alokasi dana tertinggi (70-80% dari total dana kelolaan BPDPKS).

Karena itu, diperlukan sudut pandang lain dalam melihat kebijakan program hulu - hilir. Perlu ada integrasi program hulu dan hilir sawit sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sehingga dalam pengembangan industri sawit, perlu dilihat kebutuhan industri, dampak multiplier terhadap perekonomian, dan lainnya. Sebagai contoh, industri sawit memerlukan penciptaan tambahan pasar domestik agar produk sawit bisa lebih banyak terserap, salah satunya melalui program mandatori biodiesel. Melalui program tersebut, tujuan untuk stabilisasi harga CPO dan juga ekspor sawit juga bisa tercapai. Tanpa adanya program-program itu, tidak akan ada dana sawit. Padahal, penggunaan dana sawit juga ditujukan untuk pengembangan industri sawit, tidak hanya di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutannya baik sebagai bahan pangan, bahan baku industri maupun untuk pemenuhan kebutuhan energi.

Peniadaan program mandatori biodiesel akan berpengaruh kepada stabilisasi harga CPO dan stok menumpuk yang akan mengakibatkan keseimbangan industri sawit dapat terganggu. Begitu juga sebaliknya, tanpa dukungan program Peremajaan Sawit Rakyat, program biodiesel juga akan terancam keberlanjutannya karena terbatasnya pasokan bahan baku sebagai akibat kondisi kebun sawit yang sudah tidak produktif karena rata-rata sudah memasuki usia lebih dari 25 tahun. Itulah sebabnya integrasi program hulu dan hilir diperlukan, sehingga program Peremajaan Sawit Rakyat harus dijalankan, agar kebun mereka semakin produktif sehingga pasokan untuk kebutuhan industri hilir juga tersedia.

Masing-masing program memiliki tantangannya sendiri, yang tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi BPDPKS dan pemangku kepentingan industri sawit. Di tahun 2021 tentu tantangan akan semakin besar. Untuk program mandatori biodiesel, di tahun 2021, faktor pergerakan harga minyak dunia memberikan tantangan tersendiri bagi kebutuhan dana insentif biodiesel.

Sedangkan di program PSR, lebih banyak lagi tantangan di tahun 2021, antara lain validitas data lahan dan profil pekebun swadaya, status lahan, kelembagaan petani, akses terhadap dukungan finansial/perbankan, dan kesiapan kelembagaan petani dalam pemenuhan persyaratan PSR. Hal-hal tersebut yang akan menjadi fokus penyempurnaan kebijakan di tahun 2021.

Pada akhirnya dukungan program sektor hulu dan hilir oleh BPDPKS dan pemerintah merupakan prioritas bersama, tidak ada satu program yang lebih penting dari program lainnya. Integrasi pelaksanaan semua program di BPDPKS sangat penting untuk didorong dan koordinasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat krusial dan penting untuk terus didorong. Keberlanjutan sawit nasional perlu disupport dengan program PSR yang terintegrasi dengan program riset yang berkualitas, pengembangan SDM yang kompeten, pengadaan sarana dan prasarana yang tercukupi serta penyerapan pasokan CPO yang sesuai melalui penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati dan hilirisasi sawit serta promosi dan advokasi yang terarah untuk diseminasi dan melawan kampanye hitam sawit.

PIC:

Sulthan M Yusa (Plt Kadiv LKCS).

sulthan.yusa@bpdp.or.id

HP 0818713903